

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, Muslan, *Ketidakpatuhan TKI: Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, (Malang; UMM Press, 2006).
- Agusmidah, dkk., *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017*, (Medan: Yayasan Al-Hayat, 2020).
- Agustini, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023).
- Inayati, Ade Putri, dkk., *Analisis Data Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2022: Kajian Berdasarkan Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Crisis Center*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, (2023).
- International Labour Organization, *Hak-hak Pekerja Migran – Buku Pedoman*, (Jakarta, Indonesia: ILO, 2006).
- International Labour Organization, *Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender (Implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017)*, (Jakarta, Indonesia: ILO, 2022).
- International Organization for Migration, *Labour Migration from Indonesia: An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle East*, (Jakarta, Indonesia: IOM, 2010).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2020).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, (2020).

Nawi, Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, (2014).

Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Analisis Pasar Kerja Luar Negeri Tahun 2023*, (Desember, 2023).

Suryani, Any, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2020).

B. JURNAL

Hariani, Septi, dan Najamuddin Khairur, Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan *Zero Unprocedural PMI*, *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 3, No. 1, (Februari, 2023).

Hidayatul, Siti, dkk., “Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Sebagai Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur”, *JAMIN : Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan*, Vol. No.3 (Juni 2022).

Ibrahim, “Kebijakan Perlindungan Buruh Migran di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Program Pe-Ri Kabupaten Indramayu)”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2024).

- Juliska, Sanggera, dkk., “Pelaksanaan Pelindungan Administratif dan Teknis Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu)”, *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Vol. 13, No.1, (Juni, 2024).
- Kholidazia dan H.A. Djazim, Modus dan Faktor Penyebab Maraknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang, *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2023).
- Longgarini, Apri, dkk., “Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Kemigrasian”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23, No.2, (Juli, 2023).
- Nevia, Grace, dan Arsenius Wisnu, “Strategies for Preventing Exploitation of Non-Procedural Indonesian Migran Workers (PMI) Based on Routine Activity Theory”, *Journal of Law, Politic, and Humanities*, Vol. 4, No. 4, (Mei, 2024).
- Nofita, Dwi, dkk. “Peranan Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No.3, (2019).
- Romli, Moh., dan Devi Rahayu, “Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia”, *Simbur Cahaya*, Vol. XXXI, No. 1, (Juni, 2024).
- Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law&Governance Journal*, Vol. 2, No.3, (Agustus, 2019).

Sonhaji, “Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lainnya”, *Administrative Law&Governance Journal*, Vol.1, No. 1, (Mei, 2018).

Sonhaji, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, (Maret, 2020).

Sutra, Heni dan Syofyan Hadi, “Kewajiban Negara dalam Meberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 6, No.2, (2023).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convetion on the Protection of the Rights All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Cipta Kerja*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang *Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang *Badan Pelindungan pekerja Migran Indonesia*.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang *Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia*.

International Labour Organization, Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No.97), artikel 11 (1).

United Nation, *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in persons, Especially Woman and Children*, (2000), Article 3.

D. WAWANCARA

BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Tahun 2024: Mobile Sosialisasi 'JARIK LURIK'*, 2024.

BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta, Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI melalui Program Jarik Lurik, Juni, 2021.

Wawancara, Syahrul Maizar (Pengantar Kerja Pertama, Ketua Pelaksana Program JARIK LURIK), 18 Desember 2024, pada pukul 13.00 di Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara, Syahrul Maizar (Pengantar Kerja Pertama, Ketua Pelaksana Program JARIK LURIK), 14 Januari 2025, pada pukul 14.00 via *Online*.

E. INTERNET

BP2MI, "BP3MI D.I.Yogyakarta Luncurkan BP2MI Corner sebagai Langkah Optimalisasi Pelayanan kepada Pencari Kerja", *BP2MI*, 20 Agustus, 2024, <https://bp2mi.go.id>. Diakses pada 9 januari 2025.

BP2MI, "Data Layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Januari s.d. Desember 2024," *Pusat Data dan Informasi BP2MI*, Januari, 2025, 23.

BP2MI, "Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2023," *BP2MI*, Januari, 2024, 6.

BP2MI.go.id., “Skema Penempatan”, *BP2MI*.

Kantor Imigrasi Batam, “Kerja di luar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Prosedura”, 18 Desember, 2020, <https://kanibatam.kemenkumham.go.id>. Diakses pada 6 November 2024.

Mulianingsih, Maulani, “Kementrian P2MI: Remitansi Tahun 2024 mencapai Rp251,5 Triliun, Naik 14 Persen,” *DetikNews*, 31 Desember, 2024, <https://news.detik.com>. Diakses pada 3 Januari 2025.

Nurul, Fika, dan Icha Rastika, “Jumlah Terbaru Penduduk RI: Total 282.477.584 Jiwa, Terbanyak Laki-Laki,” *Kompas*, 7 Maret, 2024, <https://www.kompas.id>. Diakses pada 28 Oktober 2024.

Rahmawati, Vika, dkk., “Kajian Vol. 6: *Labour Economics*: Pekerja Migran Indonesia Problematika Pahlawan Devisa Negara”, *Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM*, Juni, 2024, 2.

Rodani, Agus, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 29 Juli, 2022. <https://djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 30 Desember 2024.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Cegah TKI Non-Prosedural, Kemnaker Operasikan Layanan Satu Atap di 11 Kota/Kabupaten”, 7 April, 2017, <https://www.setkab.go.id>. Diakses pada 12 November 2024.

Serikat Buruh Migran Indonesia, “*Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya dalam Instrumen Hukum Internasional dan Nasional*”, 2, <https://www.ilo.org>. Diakses pada 6 Januari 2025.

Triyudha, Aria, “BP2MI Ungkap 4,6 Juta PMI Nonprosedural di Luar Negeri,”

Medcom, 8 Desember, 2021, <https://www.medcom.id>. Diakses pada 29 Oktober 2024.

Yoga, Agustinus, “Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia 2023 Tembus 273.747

Orang,” *Kompas*, 29 Desember, 2023, <https://www.kompas.id>. Diakses pada 28 Oktober 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Riset/Penelitian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: fh@live.undip.ac.id

Nomor : 175 /UN7.F1/AK/XI/2024
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

05 NOV 2024

Yth. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Jl. Candi Sambisari No.311
Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Maria Salsa Syakira
NIM : 11000121120051
alamat : Jl. Prima Selatan No. 38, Semarang
nomor HP : 08112765500
bidang minat : Hukum Administrasi Negara
judul skripsi : Urgensi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Lampiran 2. Surat Persetujuan Ijin Riset/Penelitian



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA-
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Sambisari No. 311A Juwangen, Purwomatani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Telp.: 0274-497403 Fax 0274-497442 www.bp2mi.go.id

Yogyakarta, 08 Januari 2025

Nomor : B.21/BP3MI11/PK.04/I/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Hal : Persetujuan Ijin Riset/Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Diponegoro Nomor : 175/ UN7.F1/ AK/XI/2024 dengan perihal Permohonan Riset/ Penelitian mengenai Urgensi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Yogyakarta oleh mahasiswa yang bernama :

Nama : Maria Salsa Syakira
NIM : 11000121120051
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara

Dapat kami sampaikan bahwa BP3MI D.I.Yogyakarta mempersilahkan kepada sdri. Maria Salsa Syakira untuk melakukan Riset/ Penelitian yang diperlukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta



TONNY CHRISWANTO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

